

KEBERTAHANAN KOPERASI DI KABUPATEN PONOROGO

Dwiati Marsiwi^{1)*}, Arif Hartono²⁾

¹⁾Univertias Muhammadiyah Ponorogo

²⁾Univertias Muhammadiyah Ponorogo

*Korespondensi: dmarsiwi@umpo.ac.id

ABSTRACT

Cooperatives in the history of Indonesia are a form of popular business, which aims to support the economic power of the Indonesian people. But unfortunately the reality is that the existence of cooperatives today is like being reluctant to die, not wanting to. This study aims to examine how much cooperatives in Ponorogo Regency are able to withstand the threat of business development with a free market model. This study uses a sample of Cooperatives in the Districts of the City of Ponorogo Regency and KUD in Ponorogo Regency. The number of KUDs as many as 22 and 222 cooperatives registered in Kota Subdistrict. The sample used is KUD in Ponorogo Regency and Cooperatives in the City District of Ponorogo Regency which is still active. The number of questionnaires distributed as many as 100. The number of questionnaires that were returned and can be processed as much as 72. The research method that will be conducted in this study is descriptive analysis. Cooperative management is still done with but the supervisor is not functioning. Mentoring programs and assistance from related agencies have not been received evenly in all cooperatives. In terms of financial management is still carried out in an orderly manner.

Keywords: Cooperatives, KUD, management of cooperatives, Survival

ABSTRAK

Koperasi dalam sejarah Indonesia merupakan bentuk dari usaha kerakyatan, yang bertujuan untuk menyangga kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Namun sayang sekali pada kenyataannya bahwa keberadaan koperasi saat ini bagaikan hidup segan mati tak mau. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar koperasi di Kabupaten Ponorogo mampu bertahan dari ancaman perkembangan bisnis dengan model pasar bebas. Penelitian ini menggunakan sampel Koperasi di Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo dan KUD di Kabupaten Ponorogo. Jumlah KUD sebanyak 22 dan 222 koperasi yang terdaftar di Kecamatan Kota. Sampel yang digunakan adalah KUD di Kabupaten Ponorogo dan Koperasi di Kecamatan Kota Kabupaten Ponorogo yang masih aktif. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 100. Adapun jumlah kuesioner yang kembali dan bias diolah sebanyak 72. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pengelolaan koperasi masih dilakukan dengan namun pengawas kurang berfungsi. Program pendampingan dan bantuan dari dinas terkait belum diterima merata pada semua koperasi. Dalam hal pengelolaan keuangan masih dilakukan secara tertib.

Kata kunci : Koperasi, KUD, pengelolaan koperasi, Kebertahanan

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan hukum/ lembaga yang selama ini oleh pemerintah Indonesia dianggap sebagai “**soko guru**” perekonomian Negara. Tidak heran, mengingat koperasi memiliki motto “dari, untuk, dan oleh anggota”. Dengan demikian diharapkan terdapat pola pengawasan yang baik dari anggota.

Namun demikian koperasi pernah berkembang pesat pada tahun 2000-an. Banyak sekali berdiri koperasi terutama koperasi simpan pinjam, sehingga persaingan menjadi ketat. Kondisi ini kemudian berubah menurun drastis setelah kedatangan beberapa koperasi simpan pinjam yang mengalami kredit macet pada tahun 2007-2008. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Saat ini koperasi masih cukup banyak berdiri, namun kebradaannya dan ruang lingkup usahanya tidak berkembang dengan lebih baik. Kebanyakan koperasi masih berkuat pada jasa simpan pinjam. Meskipun terdapat koperasi yang juga memiliki usaha pertokoan, slepan padi, namun jumlahnya bisa dihitung dan lebih banyak dilakukan oleh Koperasi Unit Desa.

Penelitian yang berhubungan dengan koperasi saat ini semakin jarang. Penelitian yang ada lebih banyak melihat dari sisi keuangan saja, namun belum melihat tingkat daya tahan koperasi. Mengingat tahun 2015 telah terjadi pasar terbuka tentu saja peneliti ingin mengetahui bagaimana daya tahan koperasi menghadapi pasar bebas.

Bedasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti memandang perlunya dilakukan kajian terhadap keberadaan koperasi di Kabupaten Ponorogo, sebagai penyokong perekonomian rakyat.,
PERMASALAHAN YANG MUNCUL ADALAH :

1. Bagaimana Pengelolaan (manajemen) Koperasi/KUD di Kabupaten Ponorogo
2. Bagaimana Dukungan dari Dinas Terkait
3. Bagaimana kondisi Keuangan Koperas/KUD
4. Bagaimana Kesiapan Koperasi/KUD menghadapi pasar bebas

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Koperasi di Indonesia

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang no.25 tahun 1992 tentang Koperasi menjelaskan koperasi sebagai :

1. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoprasian adalah sesuatu yang mengangkat kehidupan koperasi.

Pada hakekatnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, yang diharapkan mampu lebih berperan serta dalam pembangunan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Moh. Hatta bahwa koperasi merupakan satu-satunya jalan paling tepat untuk mengangkat, memperbaiki golongan ekonomi lemah (Soekanto : 1998). Maka melalui pengembangan dan penguatan koperasi diharapkan 90% penduduk Indonesia akan timbul kedewasaan dan kesadaran ekonomi dan rasa percaya diri untuk saling ekerja sama membangun perekonomian.

Tersirat secara lebih jauh tentang koperasi dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 bahwa dalam demokrasi ekonomi produksi dikerjakan semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat , agar kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang.

Tujuan utama badan usaha koperasi adalah untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tata perekonomian nasional. Tujuan tersebut akan dapat tercapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.

Landasan koperasi pada hakekatnya merupakan pedoman untuk, menentukan arah, tujuan, serta kedudukan koperasi. Pancasila sebagai landasan idiil koperasi di Indonesia meruoakaan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Aktivitas koperasi yang berdasarkan pancasila agar setiak gerak dan tujuan koperasi benar-benar sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia.

Disamping itu UUD 1945 merupakan landasan structural koperasi. Dalam UUD 1945 termuat secara jelas tentang aturan-aturan pokok sebagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Mengenai tata kehidupan dan perekonomian bangsa pun termaktub dalam UUD 1945 untuk mencapai tujuan Nasional.

Sebagai tata perekonomian yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia kedudukan koperasi di Indonesia memiliki fungsi :

1. Membangun dan mengembangkan petensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan nasional.

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketahanan perekonomian nasional dan koperasi merupakan soko guru perekonomian.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Persepektif Koperasi ke depan

Lingkungan koperasi dewasa ini telah berubah seiring dengan perubahan kondisi perekonomian dunia yang menuju era globalisasi. Adanya perubahan kondisi perekonomian juga harus disadari oleh koperasi Indonesia dalam hal ini para manajer atau ketua koperasi bahwa sudah saatnya koperasi mengalami perubahan pendekatan manajerial sesuai dengan pola-pola perubahan lingkungan.

Agar dapat berkembang baik dan menjadi soko guru perekonomian proses usaha koperasi hendaknya sama dengan badan usaha lain yang menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Apabila Koperasi sebagai badan usaha kerakyatan dikembangkan secara professional sebagaimana badan usaha lainnya maka tidak menutup kemungkinan koperasi mampu menopang perekonomian rakyat disamping usaha kecil dan menengah. Koperasi akan mampu munculkan kekuatan baru yang setara dengan kekuatan yang cukup besar seperti perusahaan asing dan perusahaan multinasional. Dampak bagi masyarakat kecil sendiri akan diperolehnya *economics of scale*. Melalui perbaikan pelayanan, pengelolaan, dan koordinasi berbagi keuntungan lain akan diperoleh koperasi sehingga resiko yang muncul mampu ditekan dari usaha secara bersama.

Koperasi Simpan Pinjam

Menurut peraturan pemerintah RI no 9 tahun 1995 dan keputusan menteri pengusaha kecil dan menengah RI no. 651 tahun 1998 kegiatan koperasi dan unit simpan pinjam hanya memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya.

Koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) adalah koperasi yang bergerak dibidang penumpukan simpanan dari para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan modal. Pengertian tersebut sebagaimana dirumuskan oleh Revisond tahun 2002. Kegiatan koperasi simpan pinjam diperlukan dan ditujukan juga bagi koperasi konsumsi, koperasi penjualan, koperasi jasa maupun usaha diluar koperasi.

Menurut Ketua Dikopinda Ponorogo, yang termuat dalam Ponorogo Pos tahun 2006 pada dasarnya koperasi kredit bertujuan agar anggota memiliki sikap hemat dan membebaskan anggotanya dari

para renteriner. Penyimpanan dana melalui koperasi kredit anggota akan lebih dapat menikmati hasil usahanya dan mampu memperkokoh modal dengan biaya murah. Pada proyek yang berkembang, KSP (Koperasi Simpan Pinjam) juga mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat umum diluar anggota koperasi.

Penyaluran Dana (Kredit)

Penyaluran dana atau pemberian kredit sesuai dengan UU Perbankan No 10 Tahun 1998, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank atau pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak pemberi kredit harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan pinjaman kepada pihak lain. Hal ini dimaksudkan lembaga pemberi kredit mampu mengembangkan usahanya dan terhindarkan dari kredit macet. Pertimbangan atas prinsip-prinsip pemberi kredit m,emberikan kepastian bagi lembaga keuangan bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

Kredit Macet

Terjadinya kredit macet kerap kali tidak dapat dihindari oleh lembaga kredit. Kurang telitinya analisis kredit menganalisa nasabah atau terjadinya kolusi nasabah dengan analisis kredit menjadi alasan utama.

Pada KSP pengetahuan dan pemahaman analisa kredit masih kurang tentang perbankan. Selain karena keinginan menyalurkan semua dana yang ada tanpa menyisihkan sebagian dalam bentuk simpanan di bank, dengan harapan memperoleh laba dari bunga kredit yang tinggi. Dan tidak menetapkan kebijakan batasan kredit tertinggi yang harus disalurkan. Tidak jarang kebijakan manajer koperasi yang hanya menagih bunganya saja sedangkan angsuran boleh ditangguhkan.

Nasabah bahkan sering dengan sengaja tidak membayar kewajibannya walaupun memiliki kemampuan untuk membayar. Dengan berbagai alasan agar memperoleh perpanjangan waktu kredit.

Bagi lembaga kredit seperti KSP ada baiknya jika melaksanakan batas Kredit Maksimal Pemberi Kredit (BMPK). Ini merupakan batasan tertinggi dari dana yang ada untuk disalurkan kepada nasabah atau masyarakat dalam bentuk kredit.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mubroroh tahun 2004 tentang analisis Keuangan Perbankan ternyata bahwa melalui analisa keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja perbankan dan kelayakan usaha. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Edy tentang kemampuan BMT untuk

membantu usaha kecil dan menengah ternyata lembaga keuangan belum sepenuhnya mampu merangkul semua aspek usaha kecil dan menengah dan penentuan standart 5 C masih sangat sulit dipenuhi masyarakat dan para pengusaha kecil. Sementara itu penelitian Purmiyati, dkk (2012) menunjukkan bawa koperasi wnita di Jawa Timur masih memerlukan pelatihan tata kelola organisasi, pelatihan manajemen keuangan dan pelatihan laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan koperasi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUD di Kabupaten Ponorogo dan Koperasi di Kecamatan Kota di Kabupaten Ponroogo.

Data yang digunakan adalah data primer, dimana responden yairu pengurus koperasi diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan. Kuesioner yang disebarakan berisi tentang informasi umum dan pengelolaan manajemen koperasi. Sedangkan untuk meneliti pengelolaan keuangan peneliti menggunakan laporan keuangan tahun 2012-2013.

Kuesioner terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi informasi umum koperasi den pengurus koperasi. Bagian kedua adalah kuesoner bersifat tertutup, yang berisi pernyataan tentang pengelolaan koperasi. Setiap item pertanyaan akan diukur dengan skala pengukuran.

Responden diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan pemahamannya. Pengukuran jawaban responden diberi bobot sebagai berikut Setiap item pertanyaan akan diukur dengan skala pengukuran. Dari kuesioner kemudian dilakukan analisis deskriptif. Analisis ini untuk menguraikan kondisi koperasi dan KUD saat dilakukan penelelitian.

HASIL PENELITIAN

Dari 22 Koperasi Unit Desa di Kabupaten Ponorogo hanya dapat diteliti 21 KUD. Satu KUD, yaitu KUD Handayani sudah tidak aktif . Koperasi yang digunakan sebagai sampel adalah seluruh jenis koperasi yang masih aktif beroperasi. Dari 222 Koperasi di Kecamatan Kota, terdapat 100 koperasi yang masih aktif. Sedangkan yang lainnya koperasi hanya tinggal papan nama dan sebagian lainnya telah berpindah tempat tanpa menginformasikan ke Indakop.

Bahkan berdasarkan Hasil wawancara dengan pegawai Indakop bidang pembinaan, koperasi yang masih tertib menyampaikan laporan keuangan ke Indakop sebanyak 100. Sehingga jumlah kuesioner disebar 100 ekslembar. Dari 100 ekslembar, kuesioner yang kembali dan bisa diolah sebanyak 72 .

Tabel 1
Data Informasi Aktifitas Koperasi

Parameter	Jumlah Jawaban ya (%)	Jumlah Jawaban tidak (%)
Pengelolaan secara penuh (bukan sampingan)	20	80
Masih adanya komunikasi dengan pengurus	70	30
Pegawai berfungsi sebagaimana mestinya	90	10
Selalu melaporkan diri ke Dinas Koperasi	80	20
Buku orgsnisasi masih dimiliki	95	5
Masih ada rapat pengurus dan rapat pengawas	80	20
Masih melakukan RAT setiap tahun	75	25
Aktifitas usaha berjalan dengan baik	80	20
Masih memiliki asset yang masih bias dikembangkan kembali	40	60
Apakah masih bersedia dilakukan pembinaan untuk penyehatan koperasi	100	0
Apakkah masih ada kepercayaan dari kreditur	75	25
Apakah pernah dilakukan pendampingan oleh dinas Koperasi	95	5
Masih ada kecukupan modal untuk menjalankan usaha	60	40
Adakah anggota yang masih membayar kewajibannya	90	10

Berdasarkan table 1 tersebut dapat diketahui bahwasanya koperasi di Ponorogo yang masih aktif dan dijadikan sampel penelitian sebagian besar masih memiliki harapan untuk mengembangkan atau membangkitkan kembali kegiatan koperasi. Namun masih perlu adanya pendampingan dari dinas terkait maupun lembaga lainnya. Mengingat jumlah asset maupun modal usaha yang dimiliki saat ini sangat minim.

Kegiatan Koperasi masih berjalan dengan baik meskipun persaingan pasar semakin tinggi. Hal ini diketahui bahwa anggota koperasi masih 90 % melakukan kewajibannya sebagai anggota, yaitu membayar simpanan wajib. Demikian juga kegiatan pada pengurus, pengawas dan administrasi masih dijalankan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan meskipun jumlah koperasi di Kabupaten Ponorogo yang bertahan sangat sedikit, namun masih memiliki harapan untuk bangkit kembali berada dalam kancan perekonomian. Koperasi hanya perlu model atau bentuk pengelolaan yang terbaru sesuai dengan kebutuhan perekonomian global. Koperasi di Kabupaten Ponorogo perlu uluran tangan dari pemerintah maupun lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Santoso, 2005, Pengaruh Pemberian Kredit Usaha BMT Surya Mandiri Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, Fenomena, Vol. 2 No. 1, Januari, LPPM Univ, Muhammadiyah Ponorogo
- Hudiyanto, 2002, Sistem Koperasi, Idiologi, dan Pengelolaan, Univesitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Purmiyati, Atik, dkk, Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Koperasi Wanita di Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, www.digilibunair.go.id.
- Sukanto, Reksohadiprojo, 1998, Manajemen Koperasi, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- , Undang-Undang Dasar 1045
- , Undang Undang No. 25